

## ***KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA ERA PANDEMI COVID-19***

**Ulfa Dj. Nurkamiden**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: ulfadjnurkamiden@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan berbagai Negara di bumi berdampak sangat luar biasa terhadap berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan, politik, sampai pada bidang pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi dan kebijakan yang diambil dalam menghadapi pandemi agar kualitas pendidikan tetap terjamin mutunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang datanya didapatkan dari berbagai literature yang dikaji dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara teoretis dan filosofis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1. kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah lebih berorientasi kepada keselamatan peserta didik, pendidik, tendik, dan masyarakat secara umum. 2. Lembaga pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur model pembelajaran yang kiranya sesuai dengan kebutuhan pada saat pandemi. 3. Membatalkan pelaksanaan ujian Nasional bagi peserta didik.*

**Kata Kunci:** *Manajemen Pendidikan Tinggi, New Normal, Peluang dan Tantangan.*

### **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic that hit Indonesia and various countries on earth had a tremendous impact on various sectors, such as the economy, health, politics, to the education sector from elementary to college. Thus, this study aims to see how the strategies and policies taken in dealing with the pandemic are so that the quality of education remains guaranteed. The method used in this study is a literature review whose data is obtained from various literatures that are studied and analyzed using a theoretical and philosophical approach. The results of this study found that 1. the main policies taken by the government were more oriented towards the safety of students, educators, staff, and society in general. 2. Educational institutions are given the authority to regulate learning models that would be in accordance with the needs during a pandemic. 3. Canceling the implementation of the National exam for students.*

**Keywords:** *Higher Education Management, New Normal, Opportunities and Challenges.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir mengalami pandemic yang disebut Covid-19. Hadirnya virus covid-19 bahkan menghebohkan seluruh Negara yang ada di dunia. Virus yang berasal dari Wuhan ini cukup merepotkan dan begitu sangat berdampak tidak baik bagi kehidupan manusia, bahkan nyaris melumpuhkan berbagai sector seperti kesehatan, ekonomi, politik, dan pemerintahan yang berakibat terganggunya pelayanan publik.

Dunia pendidikan juga ikut terdampak akibat virus tersebut, baik dari segi pelayanan sampai pada ranah praksis yang sejatinya proses pembelajaran selama ini dilakukan secara tatap muka baik dalam kelas atau ruang-ruang akademik ilmiah lainnya beralih kepada ruang virtual yang tanpa memerlukan kehadiran fisik, namun proses pembelajaran tetap bisa berlangsung, walaupun begitu banyak masalah yang ditimbulkan akibat pergeseran dari tatap muka ke daring.

Kehadiran covid-19 tidak hanya merubah dunia pendidikan namun juga semua tatanan kehidupan sosial masyarakat, dari kelas bawah sampai kelas elite ikut merubah cara beraktivitas baik untuk diri sendiri maupun saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan banyak lagi perubahan yang terjadi secara signifikan. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang terkait dengan pendidikan juga ikut berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat pandemi ini berlangsung.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat pandemic covid-19 sekaligus sebagai bahan analisis untuk melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut dalam ranah praksis dan juga sebagai refleksi untuk menghadirkan ide-ide konstruktif demi mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di era pandemic covid-19 yang sedang berlangsung.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan sumber data utama diambil dari referensi baik buku, media cetak/online, dan sumber lainnya yang dapat mendukung data penelitian ini. Data yang didapatkan kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan teoretis-filosofis. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang mengatakan bahwa, dalam studi pustaka selain bentuk kajian yang memerlukan kebermaknaan empirik, ada juga bentuk kajian kepustakaan yang lebih memerlukan pengolahan seacara teoretis dan filosofis.<sup>1</sup> Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Dimana data yang didapatkan dianalisis kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan agar kemudian data yang ditemukan tersebut otentik dan memenuhi syarat karya ilmiah.

---

<sup>1</sup> Noeng, Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011). hal. 101.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pendidikan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memiliki tujuan serta cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup> Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke-dan-an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.

Kebijakan pendidikan bisa dipahami sebagai kebijakan publik dalam ruang lingkup pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum dan berbagai aturan yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, kebijakan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus sejalan dengan kebijakan publik. Dimana dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Kebijakan pendidikan juga berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan.<sup>4</sup>

### Tahapan Pengambilan Kebijakan Pendidikan

Setiap pengambilan kebijakan pasti memiliki prosedur dan proses yang melatar belakangi lahirnya kebijakan tersebut, dari awal sampai pasca kebijakan tersebut dikeluarkan. Hal tersebut berlaku juga dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

<sup>2</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). hal. 12

<sup>3</sup> Riant Nugroho, *Public Polic* .(Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2008). hal. 35-36

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.264.

a. Formulasi

Formulasi atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisi serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai rencana yang mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program serta sumber daya yang dikerahkan

b. Implementasi

Implementasi kebijakan, dimana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.

c. Evaluasi

Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektivan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholders). Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai. evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholder mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan. Evaluasi juga memberikan paparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada kompleksitas lebih besar evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang sesuai sasaran. Evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan sasaran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan. Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu, tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program.<sup>5</sup>

### **Kebijakan Pendidikan di Indonesia**

Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah terkait dengan pendidikan di Indonesia saat pandemic covid-19 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah lebih berorientasi kepada keselamatan peserta didik, pendidik, tendik, dan masyarakat secara umum.

---

<sup>5</sup> Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hal.89.

Pemerintah terus berupaya untuk menekan penyebaran virus covid-19 ini dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengatur waktu kerja para pelaku dunia pendidikan dengan sistem WFH, WFO. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerumunan dan penumpukan di lembaga pendidikan, saat jam kerja. Namun, pelayanan tetap bisa dilakukan dengan baik. Dan jika ada kegiatan yang memang mengharuskan kehadiran fisik, maka dibatasi maksimal 50% dari kapasitas semestinya, dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan SWAB gratis, dan Isolasi serta perawatan secara gratis bagi yang terdampak (positif) covid-19. Sampai yang terakhir adalah program vaksinasi masal secara gratis.

2. Lembaga pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur model pembelajaran yang kiranya sesuai dengan kebutuhan pada saat pandemi. Kebijakan ini diambil agar pembelajaran dan pelayanan akademik tetap berlanjut. Selain itu, kebutuhan dan dampak dari tiap daerah itu berbeda satu dengan lainnya, ada yang zona merah, orange, sampe hijau. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan lokasi dari zona tersebut. namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut, seperti pembelajaran secara daring atau online masih dianggap sulit terutama bagi daerah-daerah yang kurang memadai terkait fasilitas internet, sampai pada banyaknya masyarakat yang susah untuk mendapatkan akses internet karena terbatasnya kemampuan financial untuk membeli perangkat yang dijadikan alat untuk pembelajaran, seperti laptop dan smartphone.

3. Membatalkan pelaksanaan ujian nasional bagi peserta didik. ujian nasional menjadi salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19, hal ini sekaligus menjadi jawaban dari kritik yang selama ini dilontarkan oleh para praktisi pendidikan, bahwa ujian nasional tidak bisa dijadikan standart untuk menentukan lulus tidaknya seorang siswa. Namun, dengan adanya covid-19 ini kebijakan penghapusan ujian nasional di ambil sebagai ikhtiar pemerintah dalam menghadapi pandemi. Dan bisa saja kebijakan ini akan terus berlangsung pasca pandemic, sebagaimana harapan para praktisi pendidikan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 seperti yang terjadi saat ini sudah cukup baik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Namun demikian, kebijakan tersebut masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan lagi efektivitasnya terutama pada tahap implementasinya dilapangan. Sehingga kebijakan tersebut benar-benar bisa

dirasakan manfaatnya dan bisa menjadi sebuah solusi konstruktif dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam era pandemic covid-19.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asmawi, M. N. 2018. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas dan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Scolae: Journal of Pedagogy*, 1(2), 1-10.

Budiharjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.

Nugroho, Riant *Public Polic* .Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Solichin, M. 2015. Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.